

TESIS

**KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA
DALAM MENGADILI SENGKETA PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**



INDAH TRI HARYANTI
No. Mhs : 125201892/PS/MIH


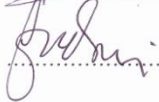
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : INDAH TRI HARYANTI
Nomor Mahasiswa : 125201892
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	18/2/2015	
Dr. E. Sundari, S.H., M. Hum.	10/2 '15	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : INDAH TRI HARYANTI
Nomor Mahasiswa : 125201892
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Nama Penguji	Tanggal	Tanda tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. (Ketua)	9/3/15	
Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. (Sekretaris)	6/3 '15	
D. Krismantoro, S.H., M.Hum. (Anggota)	27/2 2015	

Ketua Program Studi,

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.

PROGRAM
PASCASARJANA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik strata satu, strata dua dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Yang membuat pernyataan,



Indah Tri Haryanti

No. Mhs. 125201892

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum beserta kendala-kendala dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Hal ini terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus menerima atau menolak keberatan dari pihak yang berhak atas penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur.

Dalam penelitian ini penulis membahas ketidaksinkronan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketidaksinkronan tersebut selain berkaitan dengan masalah subyek gugatan, obyek gugatan, tenggang waktu mengajukan gugatan, tenggang waktu penyelesaian sengketa, upaya hukum yang dapat dilakukan dan tenggang waktu pengajuan upaya hukum yang lebih penting adalah masalah sistem penanganan perkaranya atau hukum acara yang harus dilaksanakan oleh hakim pemeriksa sengketa tersebut.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan beberapa orang hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diperoleh suatu sistem yang dapat diterapkan dalam mengisi kekosongan hukum acara dalam hakim menangani sengketa tersebut, yaitu dengan memberdayakan keberadaan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan menggabungkan sistem penanganan perkara yang telah ada. Disini perlu ketelitian dan ketegasan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melihat dan menentukan bahwa suatu perkara apakah ada kaitannya dengan kepentingan umum atau tidak. Setelah itu harus ada ketegasan dari hakim pemeriksa untuk membuat jadwal persidangan yang disepakati oleh para pihak sebelum pemeriksaan sengketa dimulai. Namun dari kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan yang lebih diperlukan adalah adanya revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kata kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

ABSTRACT

Purpose of this study is to knowing how Administration Court authority in adjudicate land acquisition dispute for public interest development therewith constraints and efforts to do overcoming these obstacles. It is associated with legalized Legislation number 2 year 2012 who gave authority to Administration Court in order to receive or decline the objections from entitled party upon establishment issued by the governor.

In this study the authors take up discrepancy the rules contained in Legislation number 2 year 2012 with Legislation number 5 year 1986 jo. Legislation number 9 year 2004 jo. Legislation number 51 year 2009. Matter of discrepancies besides related with subject of lawsuit, object lawsuit, grace period filed, grace period of dispute resolution and deadline for filling legal action. And the problem more important is case handling system and law procedural must be implemented by judge examiner dispute.

Result of research and interview author with some Administration Court judges obtained a system can be implemented to fill vacancy procedural law for judge handling the case, that is by empowering presence Article 136 Legislation number 5 year 1986 and combining with existing case handling system. Here necessary accuracy and firmness from chairman of administration court for observe and determine that a case is there any relation with public interest or not. That there should be firmness from judge examiner to make trial schedule who agreed by the parties before the examinations dispute begins. However from conclusions and suggestions from authors need more revision to legislation about administration court or at least Supreme Court issue any Supreme Court Regulation to overcome the constraints.

Keyword : Administration Court, Administration Court authority

KATA HANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”**.

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk dalam menyelesaikan program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan termiakasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya atas bantuan, dorongan dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr R. Maryatmo, M.A. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak M. Parnawa Putranta, M.B.A., Ph.D., selaku Direktur Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Ibu Dr. E Sundari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan bijaksana memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar dan bijaksana memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Bapak dan ibu Staf di Sekretariat Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
8. Bapak Lilik Eko Purwanto, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
9. Bapak H. Ariyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah mengizinkan Penulis untuk melanjutkan studi program pasca sarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
10. Para Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang bersedia memberikan pendapat dan informasinya kepada penulis dalam melakukan penelitian.

11. Suami dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan motivasi dan doa serta bantuan baik secara materi maupun spiritual.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis sadar dengan sepenuh hati adanya keterbatasan akan kemampuan, tenaga dan pengetahuan penulis yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik maupun saran yang membangun demi sempurnanya tesis ini.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji	iii
Halaman Pernyataan	iv
Intisari	v
Abstract	vi
Kata Hantar	vii-ix
Daftar Isi	x-xii
Daftar Lampiran	xiii
B A B I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep	19
D. Keaslian Penelitian	21
E. Manfaat Penelitian	26
F. Tujuan Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	27
B A B II : TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Pustaka	29
1. Konsep Negara Hukum Indonesia.....	29
2. Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Dan <i>Judicial Control</i>	32
3. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara	41

4. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	44
5. Konsep Kepentingan Umum Dalam Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara	53
B. Landasan Teori	55
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	61
1. Jenis Penelitian	61
2. Pendekatan Penelitian	61
3. Sumber Data	62
a. Bahan Hukum Primer	62
b. Bahan Hukum Sekunder	65
4. Metode Pengumpulan Data	66
a. Studi Kepustakaan	66
b. Wawancara	66
5. Metode Analisa Data	67
a. Analisis Bahan Hukum Primer	67
b. Analisis Bahan Hukum Sekunder	69
6. Proses Berpikir ..	69
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	71
1. Pengertian Kepentingan Umum	71
2. Korelasi Antara Kepentingan Umum Dengan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara	78
3. Korelasi Antara Kepentingan Umum Dengan	

Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara	86
B. Kendala-Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	89
1. Penggugat Dan Tergugat Dalam Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	89
2. Obyek Sengketa Dalam Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ...	90
3. Sistem Penanganan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara	91
C. Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	100
BAB V : PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111-115
LAMPIRAN	